

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan upaya berkelanjutan untuk membantu peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani, dalam mengembangkan potensi kodratnya guna membangun peradaban manusia yang lebih baik. Proses pendidikan ini bertujuan agar peserta didik memiliki kualitas unggul, berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, dan Pancasila. Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memegang peranan penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing (Nurfiati et al., 2020). Hal ini diperkuat oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara tegas mengatur pengertian, tujuan, dan standar pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Santika, A. et al., 2023). Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang unggul, berkualitas, dan bertanggung jawab (Rozak, A. & Az-Ziyadah, A. I., 2021).

Tingkat persaingan dalam penyediaan SDM yang berkualitas semakin tajam seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rahmatin et al., 2019). Hal ini menuntut lembaga pendidikan, khususnya SMK, untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha maupun perkembangan zaman. SMK sendiri berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, didesain sebagai lembaga vokasi yang secara khusus menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif (Albert, 2020). Peran strategis SMK ini diwujudkan melalui kemitraan erat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI), dan penekanan pada kompetensi vokasional berbasis kebutuhan pasar kerja (Wibowo, N., 2016).

Kurikulum secara fundamental menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas dan aktualitas kurikulum yang diterapkan. Kurikulum yang baik harus fleksibel, responsif terhadap perubahan, dan terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan

peserta didik serta kebutuhan dunia kerja (Rahayu, R., 2022). Kurikulum yang tepat akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap akademik, melainkan juga tangguh menghadapi tantangan masa depan.

Pada beberapa tahun terakhir, pemerintah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang diyakini sebagai respons terhadap tuntutan learning loss akibat pandemi Covid-19 serta tantangan globalisasi. Kurikulum Merdeka didesain lebih sederhana, fleksibel, dan memberi ruang kreatif kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi serta minat masing-masing (Andina, F. N. A., Subayani, N. W., & Marzuki, I, 2023; Romadhon, K., Rokhimawan, M. A. et al, 2023). Kurikulum ini berprinsip pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kolaborasi bersama industri, penggunaan teknologi, serta memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengelola materi ajar dan metode pembelajaran sesuai konteks kebutuhan industri (Hutabarat et al., 2022; Santika et al., 2022). Diharapkan, lulusan SMK dapat memiliki kompetensi teknis, soft skills, dan daya adaptasi tinggi untuk mampu bersaing di dunia kerja (Siregar et al., 2023; Taufik, 2023).

Namun, berdasarkan realitas di lapangan, terdapat kesenjangan antara konsep ideal Kurikulum Merdeka dengan pelaksanaan di SMK, salah satunya di SMK Negeri 26 Jakarta. Program ini baru diimplementasikan di kelas X dan XI; belum merata di seluruh jenjang. Hasil penelitian Andina, F. N. A., Subayani, N. W., & Marzuki, I (2023) menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman guru terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka hanya mencapai 60%. Studi lain di SMK Negeri 2 Slawi mengungkap bahwa kesiapan guru sangat bervariasi dan beberapa aspek seperti instrumen penilaian, pelatihan, serta pendampingan masih lemah (Ropiyah, R., Suriswo, S., & Mulyono, T., 2024; Jurnal Education and Development., n.d.). Kendala lain mencakup kurangnya pemahaman materi, keterbatasan sumber dan bahan ajar, kesulitan penggunaan teknologi, beban kerja tinggi, serta rendahnya motivasi inovasi dalam pembelajaran (Romadhon, K., et al., 2023; Pubmedia Journals Series, 2024; Abidah, A., et al., 2020). Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara standar pelaksanaan dengan kenyataan yang berdampak pada rendahnya efektivitas, kualitas lulusan, serta relevansi dengan kebutuhan industri (Suharto, P., et al., 2020; Rudiawan, A. & Asmaroini, R., 2022; Suryarandika, R., 2024).

Atas dasar beragam realitas permasalahan dan ketidaksesuaian tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara sistematis terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMK, khususnya di SMK Negeri 26 Jakarta. Evaluasi bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan program selaras dengan standar dan pedoman resmi, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung, kendala, dan potensi perbaikan ke depan. Agar evaluasi berjalan objektif dan komprehensif, penelitian ini menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM) yang dikembangkan oleh Malcolm Provus. DEM menekankan perbandingan antara standar (ideal yang diharapkan) dengan kenyataan implementasi (fakta yang terjadi). Model ini menilai empat tahap utama: desain, instalasi, proses, dan produk, sehingga dapat memetakan *gap/discrepancy* yang menjadi basis penyusunan rekomendasi perbaikan (Provus, 1971; Stufflebeam & Coryn, 2014; Anggraini et al., 2022; Anisa & Widodo, 2020). Penggunaan DEM sangat relevan diterapkan pada program pendidikan, karena dapat memberikan gambaran detail terkait kekuatan, kelemahan, serta aspek yang harus diperbaiki sesuai kebutuhan riil di lapangan (Lee, 2019).

Dengan demikian, evaluasi dengan pendekatan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta menjadi sangat penting. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris atas implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang strategis untuk pengambilan keputusan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan ke depan.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan evaluasi pada pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta dengan menggunakan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). Ruang lingkup evaluasi dalam penelitian ini meliputi empat komponen utama, yaitu desain, instalasi, proses, dan produk. Komponen desain mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara perencanaan Kurikulum Merdeka yang disusun oleh sekolah dengan standar dan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Komponen instalasi difokuskan pada evaluasi kesiapan implementasi program, yang mencakup aspek sumber daya manusia (guru), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung,

serta pelatihan atau pendampingan yang diberikan. Komponen proses menilai pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas, khususnya strategi pembelajaran yang diterapkan, tingkat keterlibatan peserta didik, serta sejauh mana pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar. Sementara itu, komponen produk mengevaluasi hasil sementara dari implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal pencapaian kompetensi peserta didik dan penguatan *soft skills* sebagai bagian dari tujuan pendidikan vokasi. Selain itu, penelitian ini juga mencakup identifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan program, serta merumuskan saran atau rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat sekolah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hanya bersumber dari studi dokumentasi, observasi, serta wawancara kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru-guru di jurusan yang mengajar menggunakan Kurikulum Merdeka, serta peserta didik yang terlibat langsung dalam proses belajar dengan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta. Penelitian tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pihak Tata Usaha (TU), tenaga pendidik lainnya, orang tua peserta didik, maupun Dinas Pendidikan tidak menjadi sumber data atau informan dalam studi ini.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian desain dan perencanaan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta dengan standar serta pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
2. Bagaimana pelaksanaan tahap instalasi Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta, ditinjau dari kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan yang diberikan kepada guru?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas, khususnya terkait strategi pembelajaran, keterlibatan peserta didik, dan pemanfaatan teknologi?

4. Bagaimana hasil sementara pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta dalam hal pencapaian kompetensi peserta didik dan penguatan *soft skills*?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta, serta saran atau rekomendasi perbaikan yang dapat diupayakan berdasarkan hasil evaluasi setiap komponen tersebut?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan literatur mengenai evaluasi program pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan studi evaluasi kebijakan pendidikan berbasis model discrepancy.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1.4.2.1 Bagi Pengambilan Kebijakan Sekolah**

Hasil penelitian ini memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 26 Jakarta, mencakup aspek desain, implementasi, proses pelaksanaan pembelajaran, serta hasil dan kendala yang dihadapi. Informasi ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak sekolah untuk merumuskan langkah strategis dan perbaikan kebijakan, seperti peningkatan pelatihan guru, pengembangan perangkat ajar, dan optimalisasi fasilitas pendukung.

###### **1.4.2.2 Bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan**

Temuan penelitian dapat menjadi masukan penting bagi Dinas Pendidikan dan pemangku kebijakan terkait, dalam rangka penyusunan atau penyesuaian kebijakan pada tingkat yang lebih luas, utamanya untuk replikasi, penguatan, serta

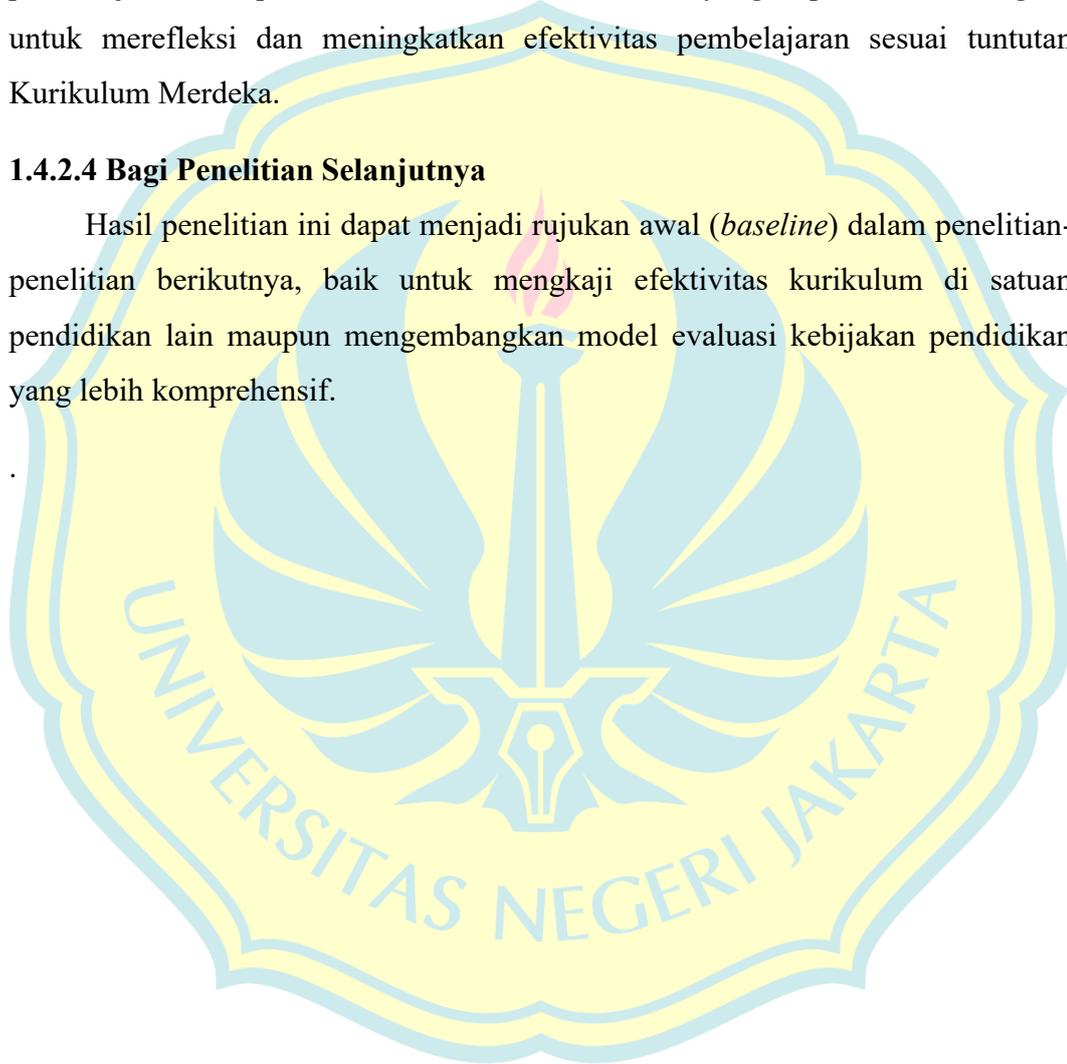
perbaikan implementasi Kurikulum Merdeka di SMK maupun satuan pendidikan lain.

#### **1.4.2.3 Bagi Guru dan Praktisi Pendidikan**

Penelitian ini memberikan umpan balik (*feedback*) terkait praktik pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum di kelas, yang dapat membantu guru untuk merefleksi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

#### **1.4.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan awal (*baseline*) dalam penelitian-penelitian berikutnya, baik untuk mengkaji efektivitas kurikulum di satuan pendidikan lain maupun mengembangkan model evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.



*Intelligentia - Dignitas*